

Lukita Teken Pemberian Kaveling

► Tahun Ini Warga Baloi Kolam akan Relokasi

rija Indonesia (TKI) yang diamankan ang, Rabu (3/5) masih diperiksa

Barelang AKP Andri Kurniawan ankan, polisi sudah melakukan nggu terakhir. Namun baru hari ini pelabuhan rakyat tempat bersan-banyak.

gintaian selama hampir satu mengamalkan TKI yang datang elap," sebut Andri.

memberikan informasi lebih lan-diperiksa.

pendataan. Yang jelas ini meru-telah kemarin ada kejadian kang-ambing di tengah laut," tegas

BATAM, TRIBUN - Kepala BP Batam, Lukita Dinar-syah Tuwo mengaku sudah menandatangani surat keputusan (SK) terkait pemberian kaveling bagi warga Baloi Kolam yang akan direlokasi. SK itu selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah Kota Batam untuk ditindaklanjuti.

"Tentu SK itu akan kami serahkan ke Pemko supaya

dilakukan pertemuan antara FKPD (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) dan masyarakat," kata Lukita, Kamis (3/5).

Japun menegaskan, re-lokasi harus dilakukan tahun ini. Rencananya ada beberapa lokasi yang bakal menjadi tempat tinggal baru bagi warga Baloi Kolam. Seperti di Kecamatan Nongsa, Sei Beduk, dan lainnya.

"Harus tahun ini, tak boleh berlama-lama," ujarnya.

Sebelumnya, pada beberapa kali kesempatan Wali Kota Batam, Rudi selalu mensosialisasikan bahwa Baloi Kolam akan dijadikan ikon baru di Batam. Karena itu, warga yang masih bermukim di sana, mesti direlokasi ke tempat lain. Ada sekitar 4.500 kepala keluarga (KK) yang bakal di

relokasi dari kawasan tersebut. Dari FKPD Kota Batam sepakat, kalau pemindahan warga akan dilakukan tahun ini.

"Dalam waktu dekat ini kita ambil tindakan. Mungkin ada sertifikat gratis dari pemerintah, saya akan masukkan itu," kata Rudi, belum lama ini.

● ke halaman 19

Warga Sei Gong Keberatan Uang Kerohiman

► Patricia Tolak Rp 21 Juta untuk Kebun

BATAM, TRIBUN - Puluhan warga Sei Gong Kecamatan Galang, memilih keluar dari ruang Balairung Sari di lantai 3 Gedung Utama BP Batam, Kamis (3/5) sore. Padahal saat itu sedang berlangsung sosialisasi rencana pembayaran uang kerohiman atau santunan terhadap bangunan dan tanam tumbuh milik masyarakat di dalam kawasan hutan lindung dan areal penggunaan lain, proyek strategis nasional pada pembangunan estuari Dam Sei Gong Batam, Kepri.

Mereka tak terima dengan besarnya nilai uang kerohiman yang sudah dituangkan dalam surat keputusan (SK) Gubernur Kepri, Nurdin Basirun.

"Untuk apa lagi kami di dalam. Kami tak pernah dilibatkan soal harga. Provinsi juga tak hadir. Mereka tak akan bergeming," kata seorang warga yang terkena dampak pembangunan Dam Sei Gong, Patricia kepada wartawan, dengan nada suara meninggi.

Patricia mengaku luasan lahannya



TRIBUN/DEWI

TINGGALKAN LOKASI- Puluhan warga Sei Gong Kecamatan Galang, memilih keluar dari ruang Balairung Sari di lantai 3 Gedung Utama BP Batam, Kamis (3/5). Mereka tak ikut sosialisasi rencana pembayaran uang kerohiman karena tak sesuai.

yang terdampak yakni seluas 23 hektare. Dari sosialisasi itu dipaparkan, untuk tanam tumbuhnya diberikan uang kerohiman sebesar Rp 21 juta, sedangkan bangunan semi permanen yang berdiri di atas lahan itu

diberi nilai Rp 40 juta.

"Berapa untuk pohon pisang, kelapa, mangga. Kok enak kali dibidang Rp 21 juta. Tumbuhkan satu pisang dalam satu tahun saja sudah berapa. Belum lagi dengan bangunan. Kalau

ditotal semua, berapa lagi yang mau saya kasih ke karyawan yang menggarap di sana," ujarnya.

Andar, warga lainnya juga tak puas dengan keputusan soal besaran uang kerohiman yang akan diberikan kepada warga itu. Terlebih untuk lahan, mereka tak mendapat ganti rugi. Lantaran disebut sebagai hutan lindung.

"Kalau dibidang hutan lindung, kantor ini (BP Batam) juga hutan lindung dulunya, tapi lihat dialihfungsikan. Ketika butuh, dibidang hutan lindung," kata Andar.

Terhadap ketidakpuasan soal besaran uang kerohiman ini, mereka akan menggelar aksi. Namun belum ada kepastian aksi apa yang akan mereka lakukan.

"Kami akan kumpul dulu. Apakah demo ke Dompok atau ke Istana, nanti kami bahas dulu," ujarnya.

Sementara itu Deputy IV BP Batam, Eko Budi Soepriyanto mengatakan,

● ke halaman 19

Lukita Teken

Selain kaveling, terhadap warga juga diberikan ganti rugi. Besarannya Rp 15 juta per rumah dari pihak pengembang. Nantinya di lokasi yang baru, juga akan

dibangun tempat ibadah. Sedangkan Baloi Kolam, nantinya bakal punya wajah baru. Di sana, akan dibangun gedung-gedung menjulang tinggi ke atas.

Warga Sei

pihaknya sudah memprediksi bakal ada ketidakpuasan dari warga soal besaran uang kerohiman itu. Pantauan *Tribun*, dari sejak awal sosialisasi yang berlangsung tertutup itu digelar, sejumlah personel Direktorat Pengamanan BP Batam dikerahkan untuk menjaga situasi tetap kondusif.

"Kami sudah prediksi ada beberapa yang pro dan kontra terhadap keputusan gubernur ini. Yang kita prediksi, orangnya itu-itu saja, tak masalah. Tapi sebagian besar sudah menerima dan siap untuk menyelesaikan pemberian dokumen, untuk mengambil uang kerohiman," kata Eko.

Dikatakan, pemberian uang kerohiman akan disalurkan 9 Mei ini kepada warga yang siap menerima. Total ada 46 warga Sei Gong yang berhak menerima uang kerohiman. Total keseluruhan anggaran Rp 3 miliar yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Demi keamanan, pembayaran akan dilakukan via transfer bank.

"Dalam SK dan Perpres Nomor 56 itu, yang berhak menerima uang kerohiman itu hanya 46 orang dari 78 persil. Ada untuk tanam tumbuh, bangunan. Tapi lahannya tak diganti karena itu lahan negara. Bersyukur mereka masih diberikan uang kerohiman. Kalau ikut legal opinion dari Kejati, mereka tak terima. Bersyukur presiden keluarkan Perpres 56 walaupun di hutan lindung," ujarnya.

Disinggung soal penentuan besaran uang kerohiman, Eko mengatakan itu sudah melalui sistem perhitungan appraisal oleh tim independen.

"Ada kajiannya. Masing-masing pohon beda. Ada sengon, mahoni dan sebagainya," kata Eko.

Lantas bagaimana dengan warga yang masih tak puas,

"Di situ akan dibangun hunian ke atas. Untuk block plannya sudah disepakati secara umum dengan pelaku usaha di sana," ujarnya. **(wie)**

Sambungan Hal.13

dan tak terima dengan besaran uang kerohiman itu, Eko mengatakan, prosesnya akan tetap berlanjut.

"Nanti kalau ada yang tak mau, anggaran kan tak boleh di sini (BP Batam). Uang akan dititipkan ke Pengadilan Negeri Batam. Jadi nanti urusannya warga ke PN," ujarnya sembari menyebut saat ini progres pembangunan Dam Sei Gong sudah mencapai 70 persen. **(wie)**

BATAM SERVICE AC

Komp. Ruko Rananta Blok C No. 5
Telp. 0778-4167486 HP/WA: 081364414123

MURAH - JUJUR - TEPAT WAKTU

MELAYANI :

- Bongkar Pasang AC
- Cuci AC
- Isi Freon
- Tukar Tambah AC
- Servis Mesin Cuci
- Servis Kulkas
- Instalasi Listrik



Panasonic SHARP SANYO
SAMSUNG MITSUBISHI ELECTRIC LG

CV ZAHRA TEKNIK

www.serviceacbatam.co.id

Batam Kota Jadi Percontohan Program GISA

► Dorong Masyarakat Sadar Adminduk

BATAM, TRIBUN - Pemerintah Kota Batam meluncurkan Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA). Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Said Khaidar mengatakan, ini merupakan tindak lanjut dari peluncuran GISA secara nasional, beberapa waktu lalu.

"Saat rapat kerja nasional (raker-nas) kemarin kan Mendagri (Menteri Dalam Negeri) datang ke Batam, di situ launching GISA nasional. Kemudian daerah menindaklanjutinya," kata Said kepada *Tribun*, Kamis (3/5).

Dengan adanya GISA ini, warga diminta untuk lebih pro aktif jika ada perubahan data terkait identitas diri-

nya. Menyangkut alamat, status, dan lain sebagainya.

"Untuk di Batam, Batam Kota itu jadi percontohan, mengingat penduduknya yang terbilang padat," ujarnya.

Menurutnya, usai diluncurkan untuk Batam, GISA juga akan diluncurkan per kecamatan. Selanjutnya masing-masing kecamatan akan menunjuk kelurahan yang menjadi contoh program GISA.

Lebih lanjut, Said mengatakan, peluncuran GISA ini menindaklanjuti instruksi Mendagri. Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat di bidang administrasi kependudukan menuju masyarakat tertib, pemerin-

tahan yang efektif dan efisien, serta negara yang memiliki daya saing berdasarkan undang-undang terkait administrasi kependudukan.

"Di instruksi itu kami diminta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melaksanakan GISA, menciptakan ekosistem yang mendukung suksesnya GISA," kata Said.

Patokannya pada program sadar kepemilikan dokumen kependudukan, program sadar pemutakhiran data penduduk. Kemudian program sadar pemanfaatan data kependudukan dan program sadar melayani administrasi kependudukan menuju masyarakat yang bahagia," ujarnya. **(wic)**

Komisi I Minta Perusahaan Selesaikan

► Warga Protes Pendirian Tower

BATAM, TRIBUN - Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kota Batam adakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait penolakan pembangunan menara telekomunikasi warga RT/RW 03/12 Kelurahan Tiban Baru Kecamatan Sekupang. Sesuai agenda harusnya RDP ini berlangsung pukul 10.00 WIB. Namun molor hingga pukul 11.15 WIB. Terlihat perwakilan warga, RT/ RW, Perusahaan, dan Cipta Karya menunggu dewan yang belum hadir.

"Karena adanya sesuatu dan lain hal baru terlaksana pukul 11.15 WIB. Saya mohon maaf karena keterlambatan ini. Saya nyatakan rapat ini terbuka dan dibuka untuk umum," ujar Ketua Komisi

I DPRD Kota Batam, Budi Mardianto, Kamis (3/5).

Perwakilan Warga Villa Sampurna 2, Gunawan mengatakan bahwasanya pernah RDP di Komisi III namun tidak ada hasil perembukannya, makanya dilanjutkan ke Komisi I.

Sementara perwakilan warga, Rahmat mengakui pembangunan menara ini tidak transparan. Prosesnya tidak benar, karena ketika masyarakat dibawa untuk musyawarah, perusahaan sudah memberikan uang kompensasi kepada sebagian masyarakat.

"Saya siap dengan konsekuensi yang dilakukan, saya tidak terima uang itu," kata Rahmat.

Waktu RDP di Komisi III, kata dia, harus ada pertemuan ulang. Namun tiba-tiba sudah ada izin IMB. Selain itu perusahaan juga sudah mengiming-imingi dengan jumlah tertentu.

Sementara itu perwakilan Dinas Cipta Karya, Arif memang telah mengeluarkan izin titik koordinat menara sebagai salah satu syarat untuk IMB. Persetujuan titik ini akan dikeluarkan jika sudah mendapatkan izin dari warga, RT/ RW, Lurah dan Camat. Surat pernyataan sudah ada makanya dikeluarkan izinnya.

Arif melanjutkan pernah juga mengikuti RDP di Komisi III. Ternyata masalahnya ini adalah masalah internal dan pihak RT/ RW harus membahas ulang. **(rus)**

Bazar Sembako Murah Jadi Berkah

► Warga Cukup Bayar Rp 50 Ribu

► Pemko Bagikan 8.000 Paket di Galang

BATAM, TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendistribusikan 8.000 paket sembako murah untuk warga Kecamatan Galang. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Batam Zarefriadi mengatakan 8.000 paket tersebut sudah didistribusikan ke titik distribusi yang telah ditentukan.

Untuk masyarakat di Kelurahan Sembulang jumlah sembako sebanyak 760 paket dan di Kelurahan Karas berjumlah 1000 paket. Di dua kelurahan itu bazar diselenggarakan di halaman Kantor Camat Galang.

Di Kelurahan Sijantung paket sembako yang didistribusikan sebanyak 1.000 paket, Kelurahan Rempang Cate 1.000 paket, Kelurahan Galang Baru 1.000 paket, Kelurahan Subang Mas 255 paket, Pulau Abang 1.000 paket dan Air Raja 700 paket. Bazar sembako murah ini menurutnya sebagai upaya dari Pemko Batam untuk mendorong perekonomian masyarakat Kota Batam. Zaref mengimbau agar warga dapat antri dengan tertib untuk mengambil Sembako.

"Kupon sudah ditangan, maka sudah pasti bapak/ibu akan kebagian paketya. Jadi jangan berdesak-desakan," katanya mengingatkan.

Habib, warga Kelurahan Sembulang mengatakan adanya bazar Sembako Murah ini sangat membantu masyarakat. Ia juga mengatakan bahwa bazar Sembako Murah dari Pemko Batam ini merupakan berkah Ramadan bagi warga Kecamatan Galang.

Dengan sembako murah ini warga

Kecamatan Galang cukup membayar Rp 50 ribu untuk mendapatkan paket sembako yang terdiri dari beras 5 Kg, minyak goreng 2 liter dan gula 1 Kg. Diakutnya jika berbelanja ke warung harga yang ditebus untuk tiga sembako itu akan lebih dari Rp 50 ribu.

"Kami mengucapkan terimakasih kepada Pak Wali yang sudah menyelenggarakan bazar sembako murah. Ini menjadi berkah Ramadan bagi kami. Sembako murah ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Galang," katanya senang.

Upaya Pemko Batam untuk meningkatkan daya beli masyarakat melalui bazar sembako murah ini mendapat apresiasi dari Anggota DPRD Provinsi Kepri, Tengku Afrizal Dahlan. Dengan adanya bazar ini beban perekonomian masyarakat berkurang. Harapannya seluruh masyarakat mene ngah ke bawah yang ada di Kecamatan Galang dapat menikmati sembako murah ini. Ia juga mengajak pengusaha yang ada di Kecamatan Galang dapat berkontribusi untuk membantu masyarakat setempat.

Wali Kota (Wako) Batam, Muhammad Rudi mengatakan kegiatan bazar sembako murah ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun oleh Pemko Batam. Harapannya melalui bazar sembako murah ini dapat meningkatkan daya beli masyarakat. "Untuk tahun ini Pemko Batam menyiapkan 128 ribu paket sembako murah. Putaran pertama ini didistribusikan sebanyak 64 ribu paket. Nanti sisanya kita distribusikan pada putaran kedua," kata Wako. (* / bat)



BERI SEMBAKO- Wali Kota Batam HM Rudi memberikan sembako kepada warga di Galang. Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendistribusikan 8.000 paket sembako murah untuk warga Kecamatan Galang.